

**PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN KOMPENSASI MANAJEMEN KUNCI DI LAPORAN
KEUANGAN**

**(Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2012-2016)**

Yoyo Sudaryo ¹⁾
Astrin Kusumawardani ²⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun
Jl. Soekarno Hatta No.448 Bandung

Email : yoyo.sudaryo@inaba.ac.id¹⁾. astrin.kusumawardani@inaba.ac.id²⁾

ABSTRAK

Pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan merupakan pengungkapan wajib yang tertera dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada suatu perusahaan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan menyamakan kepentingan antara agen dan pemegang saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan analisis kuantitatif. Populasi pada

penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel sebanyak 16 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Alat analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda data panel dengan uji hipotesis uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

Kata Kunci: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci di Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam penyusunannya PSAK didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan telah disepakati serta telah disahkan oleh institut atau lembaga resmi di Indonesia. PSAK menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum atau disebut *general purpose financial statements* agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan sebelumnya maupun dengan laporan keuangan lain. PSAK mengatur persyaratan struktur laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. PSAK juga diperlukan untuk memudahkan auditor serta penyusunan laporan keuangan, dan memudahkan pembaca laporan keuangan.

PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi” mengatur pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan sendiri entitas induk. Salah satu pengungkapan yang diwajibkan adalah pembayaran kompensasi kepada manajemen kunci. Menurut PSAK No. 7 (Revisi 2015), personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung dan tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas. Termasuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan. Sehingga dapat dikatakan, personil manajemen kunci perusahaan merupakan manajemen perusahaan yang berada dalam jajaran *Top Management*.

Menurut Conyon dan He (2011) dalam Akmyga dan Mita (2015) “pembayaran kompensasi kepada manajemen kunci bersifat penting karena merepresentasikan performa perusahaan dan kualitas manajerial, selain itu ditemukan juga hubungan positif antara kompensasi eksekutif dengan kinerja perusahaan”. Sehingga dengan semakin luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan, dapat meyakinkan investor untuk melakukan investasi di suatu perusahaan. Pihak

eksternal dapat menilai kinerja suatu perusahaan, salah satunya dengan melihat jumlah kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan. Hal tersebut dikarenakan pembayaran kompensasi bagi manajemen kunci ditetapkan berdasarkan tingkat kinerja yang dicapai manajemen kunci dalam memenuhi target perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan, semakin besar kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci dapat mengindikasikan semakin tinggi pula tingkat pencapaian kinerja manajemen kunci dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, dengan semakin luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan, akan semakin meyakinkan investor untuk melakukan investasi di suatu perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepemilikan Manajerial

Menurut Purwandari dan Purwanto (2012), kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh direksi, manajemen, komisaris maupun setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan. Menurut El-Gazzar *et al.* (2006) dalam Widjayanti (2015), kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris, sedangkan menurut Wayan (2008) dalam Alvionita dan Taqwa (2015), kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajemen memiliki saham dalam perusahaan dan sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan.

Adanya kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan akan membuat kesamaan kepentingan antara pemegang saham dengan para manajer. Hal ini dapat terjadi karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil dan ikut menanggung risiko atas kesalahan pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Hal ini berarti semakin besar kepemilikan manajerial maka manajemen akan semakin berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang saham yang di dalamnya terdapat manajemen itu sendiri (Astarsari dan Nugrahanti, 2015).

Kepemilikan Institusional

Menurut Shien, et al (2006) dalam Widigdo (2013), kepemilikan institusional adalah kepemilikan oleh pemerintah, lembaga keuangan, lembaga badan hukum, lembaga asing, dana perwalian, dan institusi lainnya di akhir tahun. Menurut Claessens (2002) dalam Widigdo (2013), kepemilikan institusional adalah persentasi kepemilikan yang dimiliki oleh lembaga terhadap total saham yang beredar, sedangkan menurut Beiner, et al (2003) dalam Alvionita dan Taqwa (2015), kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, atau institusi lain.

Investor institusional dianggap sebagai investor yang lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individu. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi alat *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan monitoring agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci

Menurut Antasari dan Nugrahanti (2015), pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan merupakan pengungkapan wajib yang telah diatur oleh PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi mengenai total kompensasi yang diberikan kepada personil manajemen kunci beserta masing-masing kategorinya. Menurut PSAK No. 7 (revisi 2015) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, kompensasi yaitu seluruh imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 24 tentang Imbalan Kerja) termasuk imbalan kerja yang menerapkan PSAK 53 tentang Pembayaran Berbasis Saham. Kompensasi manajemen kunci meliputi:

a. Imbalan kerja jangka pendek

Seperti: upah, gaji dan kontribusi jaminan sosial, cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar, bagi laba dan bonus (jika dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode) dan imbalan nonmoneter (seperti pelayanan kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang diberikan cuma-cuma atau melalui disubsidi untuk pekerja yang ada saat ini;

b. Imbalan pascakerja

Seperti: pensiun, manfaat pensiun lain, asuransi jiwa pascakerja dan fasilitas pelayanan kesehatan pascakerja;

c. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Termasuk cuti besar, cuti sabbatical, imbalan jangka panjang lain, imbalan cacat permanen, dan bagi laba, bonus, dan kompensasi yang ditangguhkan (jika terutang seluruhnya lebih dari dua belas bulan pada akhir periode pelaporan);

d. Pesangon; dan

e. Pembayaran berbasis saham.

Menurut Farahmita (2012), Akmyga dan Farahmita (2015), dan Astasari dan Nugrahanti (2015), luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci dihitung menggunakan metode *scoring* sebagai berikut.

1. Skor 0, perusahaan tidak mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.
2. Skor 1, perusahaan hanya menyajikan total kompensasi tanpa keterangan kategori imbalan.
3. Skor 2, apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi masing-masing komisaris dan direktur
4. Skor 3, apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi dengan memberikan deskripsi/kategori imbalan.
5. Skor 4, apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi dan memberikan rincian sub jumlah per kategori imbalan kerja. Kemudian nilai *score* dibagi dengan *score* maksimal (4).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif menurut Sekaran dan Bougie (2017) adalah penelitian yang didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, atau situasi. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.

Metode verifikatif menurut Sugiyono (2017) adalah suatu metode penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan kausalitas antara variabel melalui suatu pengujian perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan “hipotesis ditolak atau diterima”. Pada penelitian ini, peneliti akan menguji pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan secara parsial dan simultan.

Menurut Sujarweni (2015) Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing – masing variabel, baik suatu variabel atau lebih yang sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa jenis penelitian kuantitatif merupakan analisis data atau metode survey meliputi pengolahan data dengan menggunakan instrument tertentu dengan tujuan menguji hipotesis menggunakan uji *statistic*. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi Biaya Produksi, Biaya Operasional, Hasil Penjualan, hutang, dan Kinerja Keuangan (Laba Bersih) pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2018.

Yang dimaksud dengan verifikatif menurut Nazir (2014) adalah, “Metode Penelitian menguji kebenaran, dengan kata lain metode verifikatif merupakan metode untuk proses pengujian hipotesis.”

Metode verifikatif menurut Narimawati (2010) yaitu, “memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan tanpa perbaikan yang

telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.”

PEMBAHASAN

Kepemilikan Manajerial Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016

Pada bagian ini, akan diuraikan bagaimana variabel bebas pertama (X_1) pada penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. Kepemilikan manajerial ini dihitung dengan persamaan sebagaimana yang telah disajikan pada Bab II. Berikut data kepemilikan manajerial pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.

Jumlah minimum kepemilikan manajerial pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 yaitu 0%. Dari 16 perusahaan BUMN yang dijadikan sampel penelitian, terdapat 4 perusahaan yang sepanjang tahun 2012 hingga 2016 tidak terdapat kepemilikan manajerial di dalamnya yaitu PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Jumlah maksimum kepemilikan manajerial pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 yaitu sebesar 1%. Jumlah maksimum ini dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan kode BBNI pada tahun 2016, sedangkan untuk rata-rata jumlah kepemilikan manajerial pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 yaitu sebesar 0,05162%. Dari pembahasan, dapat dilihat bahwa sedikit sekali pihak manajemen yang memiliki saham pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.

Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016

Pada bagian ini, akan diuraikan bagaimana variabel bebas kedua (X_2) pada penelitian ini yaitu kepemilikan institusional pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. Kepemilikan institusional ini dihitung dengan persamaan 2.2

sebagaimana yang telah disajikan pada Bab II. Berikut data kepemilikan institusional pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.

Terlihat bahwa jumlah minimum kepemilikan institusional pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 yaitu sebesar 51,00038%. Jumlah tersebut dimiliki oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada tahun 2013 hingga 2016.

Jumlah maksimum kepemilikan institusional pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 yaitu sebesar 92,57107%. Jumlah tersebut dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2014. Hal ini menandakan bahwa hampir seluruh saham perusahaan dimiliki oleh institusi. Hanya sekitar 7,4% saham yang dimiliki oleh manajerial, perorangan, dan masyarakat.

Rata-rata jumlah kepemilikan institusional pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 yaitu sebesar 66,83461%. Jumlah ini merupakan hal yang wajar, dikarenakan seluruh perusahaan BUMN, lebih dari 50% sahamnya harus dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang termasuk ke dalam kategori institusi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 lebih banyak dimiliki oleh institusi dibandingkan dengan manajerial.

Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci di Laporan Keuangan Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016

Pada bagian ini, akan diuraikan bagaimana variabel terikat (Y) pada penelitian ini yaitu luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. Luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan diukur dengan menggunakan teknik *scoring* sebagaimana yang telah disajikan pada sub bab 2.1.7. Berikut data luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.

Dapat dilihat luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. Nilai diberikan pada setiap perusahaan menggunakan dengan teknik *scoring* yang kemudian dibagi dengan angka tertinggi yaitu 4. Nilai minimum pada luas pengungkapan

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 yaitu 0. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki nilai 0, tidak mengungkapkan kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci sesuai dengan yang telah diwajibkan pada PSAK No 7 tentang Pihak-pihak Berelasi.

Perusahaan yang sepanjang tahun 2012 hingga 2016 dinilai tidak mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan yaitu PT Indofarma (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kedua perusahaan tersebut otomatis memegang nilai minimum atas luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

Nilai maksimum pada luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 yaitu 1. Perusahaan yang mendapat nilai 1 berarti telah mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan dengan lengkap, yaitu total kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci beserta dengan rincian sub jumlah per kategori imbalan kerja. Perusahaan yang mendapatkan nilai 1 sepanjang tahun 2012 hingga 2016 yaitu PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Jumlah sampel yang mendapatkan nilai 1 hanyalah 24 sampel dari 80 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dapat diartikan bahwa 56 sampel mendapatkan nilai kurang dari 1, sehingga masih banyak sampel yang tidak mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan sesuai dengan yang diwajibkan oleh PSAK No 7 tentang Pihak-pihak Berelasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil perolehan data kepemilikan manajerial tidak menunjukkan angka yang berbeda secara signifikan. Perbedaan nilai terendah dengan nilai tertinggi tidak terpaut begitu jauh. Perusahaan dengan presentase kepemilikan manajerial terendah dimiliki oleh PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, sedangkan yang memiliki kepemilikan manajerial tertinggi adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Hasil perolehan data kepemilikan institusional juga tidak menunjukkan angka yang berbeda secara signifikan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional terendah dimiliki oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, sedangkan kepemilikan institusional tertinggi berada pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. Hasil perolehan data luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa setiap perusahaan mayoritas tidak merubah pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan setiap tahunnya. Perusahaan yang sepanjang tahun 2012 hingga 2016 dinilai tidak mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan yaitu PT Indofarma (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Perusahaan yang mendapatkan nilai tertinggi sepanjang tahun 2012 hingga 2016 yaitu PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
4. Hasil pengujian yang dilakukan secara simultan, dengan variabel bebas kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap variabel independen luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.
5. Hasil pengujian yang dilakukan secara parsial menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmyga,S.F., dan Mita, A.Farah. 2015. *Pengaruh Struktur Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci Di Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, vol 2 No.1.
- Alvionita, I., & Taqwa, Salma. 2015. “*Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure*”. Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Astasari, K.G.A., dan Y.W. Nugrahanti. 2015. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci di Laporan Keuangan*, Jurnal Manajemen, Vol. 10, No. 2, September: 162-182. <https://ojs.uph.edu/index.php/DJM/article/view/165>.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan– edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo.
- Narimawati, Umi. 2010. *Metodologi Penelitian : Dasar Penyusun Penelitian Ekonomi*. Jakarta : Genesis.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwandari, Arum dan Agus Purwanto. 2012. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Struktur Kepemilikan dan Status Perusahaan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. Diponegoro Journal Of Accounting Vol 1 No-2.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta Selatan 12610.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Widigdo, Idie. 2013. *Effect Of Corporate Social Performance, Intellectual Capital, Ownership Structure, and Corporate Governance on Corporate Performace and Firm Value (Studies on Companies Listed in The SriKehati Index)*. International Journal of Business. Economics and Law. Vol. 2. Issue. 1. ISSN. 2289-1552.
- Wijayanti, F. L. 2015. *Analisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan komisaris terhadap biaya keagenan*. Jurnal EBBAN , 6(2):1-16.